

PENGARUH TINGKAT KEMISKINAN DAN UPAH MINIMUM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN IPM PROVINSI BALI TAHUN 2015-2019

I Wayan Yoga Andika Putra¹

I Wayan Wenagama²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia

¹email: yogaandikaputra99@icloud.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar pengaruh tingkat kemiskinan dan upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis jalur (*path analysis*). Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh negatif (signifikan) terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan upah minimum berpengaruh positif (signifikan) terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten / Kota di Provinsi Bali. Tingkat kemiskinan berpengaruh negatif (signifikan) terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan upah minimum dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif (signifikan) terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten / Kota di Provinsi Bali. Pertumbuhan ekonomi memediasi pengaruh tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan pertumbuhan ekonomi tidak memediasi pengaruh upah minimum terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten / Kota di Provinsi Bali.

Kata kunci: IPM, tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, upah minimum

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze how much influence the level of poverty and minimum wages on economic growth and the Human Development Index (IPM) of districts / cities in Bali Province. The analysis technique used is the path analysis technique. Based on the analysis, it is found that the poverty rate has a negative (significant) effect on economic growth, while the minimum wage has a positive (significant) effect on the economic growth of regencies / cities in Bali Province. The poverty level has a negative (significant) effect on the Human Development Index, while the minimum wage and economic growth have a positive (significant) effect on the District / City Human Development Index in Bali Province. Economic growth mediates the effect of poverty level on the Human Development Index and economic growth does not mediate the effect of the minimum wage on the District / City Human Development Index in Bali Province.

Keywords: HDI, poverty rate, economic growth, minimum wage

PENDAHULUAN

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibuat dan dipopulerkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) sejak tahun 1996 dalam seri laporan tahunan yang diberi judul "*Human Development Report*". Indeks ini disusun sebagai salah satu dari indikator alternatif untuk menilai keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara selain pendapatan nasional per kapita, UNDP mendefinisikan IPM sebagai "*a process of enlarging people's choice*" atau suatu proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Pendekatan pembangunan manusia tidak semata-mata menjadi sebuah tujuan, namun merupakan sebuah proses. Secara spesifik, UNDP menetapkan empat elemen utama dalam pembangunan manusia, yaitu pemerataan (*equity*), produktivitas (*productivity*), pemberdayaan (*empowerment*), dan kesinambungan (*sustainability*) (Ardiansyah dan Widyaningsih, 2014).

Pembangunan menempatkan manusia sebagai titik sentral, sehingga mempunyai ciri dari, untuk, dan oleh rakyat. Karena itu pembangunan ditujukan untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam semua proses dan kegiatan pembangunan. Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya sehingga tujuan akhir pembangunan harus difokuskan kepada manusia. Kondisi seperti ini akan menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk dapat menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif, konsep ini menjadikan cikal bakal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Kusuma, 2016). Pembangunan adalah suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan besar dalam struktur

sosial, sikap masyarakat, kelembagaan nasional maupun percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan penghapusan dari kemiskinan mutlak, tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Maipita, 2014). Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah khususnya Provinsi Bali.

Pembangunan ekonomi memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan lapangan pekerjaan sehingga memperluas kesempatan kerja dan mengarahkan pembagian pendapatan yang merata di setiap daerah (Bela dan Djinar, 2019). Pada kenyataannya dilapangan tidak pernah tercapai pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat yang disebabkan beberapa hal antara lain masalah-masalah internal seperti adanya kesenjangan antar manusia, kesenjangan antar daerah dan kesenjangan ekonomi, sedangkan masalah eksternal misalnya persaingan antar wilayah, baik antar wilayah regional maupun nasional (Von Luebke, 2009). Pertumbuhan ekonomi sejalan agar dengan pembangunan manusia, maka perlu disertai dengan pembangunan yang merata, dengan adanya pemerataan pembangunan, maka adanya jaminan bahwa semua penduduk merasakan hasil pembangunan tersebut. Negara Indonesia, memberlakukan UU Nomor 32 Th. 2004 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan penuh bagi masing masing daerah, baik di tingkat provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya dengan sedikit mungkin intervensi pemerintah pusat, kebijakan tersebut dikenal dengan istilah Otonomi Daerah. World Bank (1997) dalam Khusaini (2006: 66) menyatakan bahwa pemberian otonomi daerah melalui

desentralisasi fiskal dan kewenangan daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mencapai tujuannya yaitu dengan adanya pelaksanaan pembangunan sebagai wujud desentralisasi (Jayanthi dan Arka, 2015).

Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin (Todaro, 2006:28). Tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yang menjadi fokus utama yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi (Pisano *et al*, 2015), hal ini berarti dunia bersepakat untuk berfokus pada tiga ruang lingkup tersebut salah satunya mengenai peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik (Ishartono dan Raharjo, 2016). Pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk mempertahankan kesejahteraan masyarakat, namun pertumbuhan bukan akhir dari pembangunan manusia.

IPM merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indeks Pembangunan Manusia Memiliki tiga indikator, yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir (kesehatan), angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah (pendidikan), dan

kemampuan daya beli (pendapatan). Berikut ini pada Tabel 1.1 merupakan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia dari tahun 2015-2019

Tabel 1.
Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2015-2019

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2015-2019		
Tahun	IPM	Perkembangan
2015	69,55	0,65
2016	70,18	0,63
2017	70,81	0,63
2018	71,39	0,58
2019	71,92	0,53

Sumber: BPS Nasional, 2020

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia mengalami peningkatan secara terus menerus dari tahun 2015-2019. Hal ini dikarenakan adanya langkah pemerintah untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia dalam bidang pendidikan.

Berikut ini dapat dilihat pada Tabel 2 perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Tabel 2.
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2015-2019

Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali (Poin)					
Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Jembrana	69.66	70.38	70.72	71.65	72.35
Kab. Tabanan	73.54	74.19	74.86	75.45	76.16
Kab. Badung	78.86	79.80	80.54	80.87	81.59
Kab. Gianyar	75.03	75.70	76.09	76.61	77.14
Kab. Klungkung	68.98	69.31	70.13	70.90	71.71
Kab. Bangli	66.24	67.03	68.24	68.96	69.35
Kab. Karangasem	64.68	65.23	65.57	66.49	67.34
Kab. Buleleng	70.03	70.65	71.11	71.70	72.30
Kota Denpasar	82.24	82.58	83.01	83.30	83.68
Provinsi Bali	73.27	73.65	74.30	74.77	75.38

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2020

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun 2015-2019 pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Pada tahun 2015

hingga tahun 2019 tingkat IPM tertinggi yaitu Kota Denpasar, akan tetapi tingkat IPM di Kabupaten Karangasem menjadi yang terendah, hal ini disebabkan adanya ketimpangan pendapatan dan pembangunan diantara kabupaten/kota lainnya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu dan dapat dikaitkan juga sebagai keadaan kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional, adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah pertumbuhan yang ditopang oleh investasi. Pertumbuhan yang ditopang oleh investasi dianggap akan dapat meningkatkan produktivitas sehingga membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang sangat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Pembangunan ekonomi suatu daerah pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan terus menerus untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik secara bersama-sama dan berkesinambungan, pembangunan ekonomi suatu daerah juga bertujuan untuk memacu pemerataan pembangunan daerah dan hasil-hasil pembangunan tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata (Eriek dan Wenagama, 2020). Tabel 3 menunjukkan Tingkat Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali pada tahun 2015 -2019.

Tabel 3.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
(persen) tahun 2015-2019

Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali (Persen)					
Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Jembrana	6.19	5.96	5.28	5.59	5.56
Kab. Tabanan	6.19	6.14	5.37	5.73	5.60
Kab. Badung	6.24	6.81	6.08	6.74	5.83
Kab. Gianyar	6.30	6.31	5.46	6.03	5.64
Kab. Klungkung	6.11	6.28	5.32	5.50	5.44
Kab. Bangli	6.16	6.24	5.31	5.50	5.47
Kab. Karangasem	6.00	5.92	5.06	5.48	5.50
Kab. Buleleng	6.07	6.02	5.38	5.62	5.55
Kota Denpasar	6.14	6.51	6.05	6.43	5.84
Provinsi Bali	6.03	6.33	5.56	6.33	5.63

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2020

Berdasarkan Tabel 3 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2015- 2019. Pada tahun 2015, Kabupaten Badung menduduki peringkat pertama dalam pertumbuhan ekonomi sebesar 6.24 persen dan yang terendah pada Kabupaten Karangasem sebesar 6.00 persen dari total laju pertumbuhan ekonomi Bali. Setelah tahun 2015 dapat dilihat laju pertumbuhan ekonomi menurut kabupaten/kota di Provinsi Bali mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Kondisi ini memperlihatkan ketidakmerataan dan ketidak seimbangan pertumbuhan ekonomi yang terjadi kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan *output riil* per orang. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan teknologi dalam produksi. Terdapat daerah dengan pertumbuhan yang cepat dan daerah dengan pertumbuhan yang lambat. Pemerataan distribusi pendapatan merupakan hal yang perlu diperhatikan

dalam pembangunan daerah karena Alesina dan Rodric (dalam Patta, 2012) mengemukakan bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan akan berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemudian kesejahteraan masyarakat suatu wilayah pun akan mengalami penurunan.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu upaya untuk meningkatkan pendapatan riil perkapita dalam jangka panjang dan diikuti oleh perbaikan sistem kelembagaan. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan meratanya distribusi pendapatan (Artana Yasa dan Arka, 2015). Menurut Mirza (2012) pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan positif terhadap IPM, yang berarti pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, tetapi kesenjangan ekonomi antar daerah berpengaruh yang negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Fenomena yang menarik untuk dicermati khususnya di Provinsi Bali dilihat dari beberapa hasil penelitian terdahulu (Ayu et al., 2014) dan Irvan (2015) yang menyatakan setiap daerah dalam melaksanakan pembangunan mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan pemerataan, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Modal manusia (human capital), merupakan salah satu faktor penting dalam proses pembangunan ekonomi, dengan modal manusia yang berkualitas pembangunan ekonomi yang diukur dengan meningkatnya output atau pertumbuhan ekonomi, diyakini akan lebih baik, demikian pula sebaliknya, pembangunan ekonomi dapat pula

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan pertumbuhan ekonomi akan menjamin tersedianya dana yang cukup guna peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan demikian terdapat hubungan yang saling mempengaruhi atau hubungan dua arah antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia. Menurut Ramirez (Aloysius.2002), Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pembangunan manusia melalui aktivitas rumah tangga dan pemerintah, selain adanya peran sipil seperti melalui organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Semua aktivitas tersebut berkaitan dengan pengeluaran yang baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan peningkatan kualitas manusia seperti pengeluaran untuk makanan dan gizi (rumah tangga), serta pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan dan pelatihan ketenagakerjaan (rumah tangga, pemerintah dan institusi lainnya). Pertumbuhan ekonomi, akan menciptakan investasi, membuka lapangan kerja, menyerap angkatan kerja, yang pada gilirannya akan mengurangi kemiskinan penduduk (Seran, 2017). Pertumbuhan ekonomi yang cepat oleh negara-negara di dunia menjadi syarat utama untuk mengentas kemiskinan, pertumbuhan ekonomi sendiri tidak akan cukup mengentas kemiskinan, namun pertumbuhan ekonomi adalah syarat yang dibutuhkan untuk mengentas kemiskinan (Kembar, 2013).

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia, terutama negara sedang berkembang. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan lokasi lingkungan (Kemenuh dan Wenagama, 2017).

Ketimpangan distribusi pendapatan akan menyebabkan lebarnya jurang antara si kaya dan si miskin (Rustariyuni, 2014). Menurut Yusuf dan Sumner (2015) faktor utama yang meningkatkan kemiskinan seperti halnya di Indonesia adalah adanya kenaikan harga bahan bakar dan kenaikan harga bahan makanan pokok seperti beras. Menurut Suryadarma dan Sumarto (2011) salah satu yang menghambat pengentasan kemiskinan adalah kualitas pendidikan yang buruk. Ada empat jenis kemiskinan, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relative, kemiskinan kultural dan kemiskinan structural.

Kemiskinan dapat menjadikan efek yang cukup serius bagi pembangunan manusia karena masalah kemiskinan merupakan sebuah masalah yang bermula dari ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehingga kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan pun terabaikan. Hal tersebut menjadikan gap pembangunan manusia diantara keduanya pun menjadi besar dan pada akhirnya target capaian IPM yang ditentukan oleh pemerintah menjadi tidak terealisasikan dengan baik (Mirza, 2012). Penyebab kemiskinan adalah lingkaran kemiskinan yang tidak berujung pangkal. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (IPM) menyebabkan rendahnya produktivitas kerja. Rendahnya produktivitas berakibat rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, sehingga akumulasi modal rendah dan berdampak pada terbatasnya lapangan kerja dan berarti meningkatnya jumlah pengangguran. Jumlah pengangguran yang semakin meningkat menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk miskin (Hariawan dan Swaningrum, 2015). Kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembangunan ekonomi

menjadi lebih besar, sehingga secara tidak langsung akan menghambat pembangunan ekonomi (Darmawan dan Wenagama, 2017).

Upah merupakan uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu, gaji, imbalan, hasil akibat (dari suatu perbuatan). Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan (Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Upah minimum adalah upah terendah yang akan dijadikan standar, oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja di perusahaannya. Upah minimum ini umumnya ditentukan oleh pemerintah (Gubernur dengan memerhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan/atau bupati/walikota), dan setiap tahun kadangkala berubah sesuai dengan tujuan ditetapkannya upah minimum.

Faktor- faktor yang mempengaruhi penetapan UMK yaitu 1). Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yaitu standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik, dan sosial untuk kebutuhan satu bulan, 2). Indeks Harga Konsumen (IHK) yaitu indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari satu paket barang dan jasa yang di konsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu, 3). Penetapan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu

penetapan gaji atau upah minimum dilaksanakan setiap tahun untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini, PDRB merupakan salah satu indikator terpenting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah.

Kebijakan upah minimum merupakan sistem pengupahan yang telah banyak diterapkan di beberapa negara, yang pada dasarnya bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, upah minimum merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan agar nilai upah yang diterima tidak menurun dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, sebagai alat proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan produktivitas pekerja (Simanjuntak, 1992 dalam Gianie, 2009:1). Upah minimum kabupaten/kota (UMK) merupakan komponen dari pendapatan seseorang yang tinggal di suatu daerah sehingga tingkat upah merupakan salah satu indikator yang dapat mencerminkan kesejahteraan masyarakat dari suatu negara. Peningkatan upah minimum kota akan meningkatkan kebutuhan hidup layak sehingga standar hidup layak juga mengalami peningkatan. Akibat peningkatan upah minimum yang diterima, daya beli masyarakat mengalami peningkatan sehingga berdampak positif pada *human development index* (Amirul Zamharir,2016).

Upah minimum juga merupakan salah satu pertimbangan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya disuatu daerah terutama investor yang ingin mendirikan pabrik atau industri yang banyak menyerap tenaga kerja. Semakin tinggi upah minimum kabupaten/kota suatu daerah menunjukkan semakin tinggi tingkat ekonominya. Studi Askenazy (2003) juga menunjukkan bahwa upah minimum memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui akumulasi modal

manusia. Implikasi upah minimum terhadap kesejahteraan akan terwujud dalam perekonomian yang kompetitif.

IPM menggambarkan Indeks Pembangunan Manusia yang dilihat dari sisi perluasan, pemerataan dan keadilan baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan masyarakat. Rendahnya IPM akan mengakibatkan rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah mengakibatkan rendahnya perolehan pendapatan sehingga menyebabkan tingginya penduduk miskin. (Todaro,2006:128).

Menurut Kanbur dan Squire (1999) mengkaji bahwa terdapat hubungan penting IPM dan kapasitas pendapatan produktif. Pendapatan merupakan penentu utama dan hasil dari pembangunan manusia. Orang miskin menggunakan tenaga mereka untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi kemiskinan akibat kurangnya pendidikan, serta gizi dan kesehatan yang buruk mengurangi kapasitas mereka untuk bekerja. Dengan demikian akibat rendahnya IPM orang miskin tidak dapat mengambil keuntungan oportunitas pendapatan produktif karena terjadinya pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu, penyediaan pelayanan sosial dasar merupakan unsur penting dalam penanganan kemiskinan. Kemiskinan mempunyai hubungan pada indeks pembangunan manusia karena naik dan turunnya kemiskinan sangat berkaitan dengan naik turunnya IPM. Menurut Jonaidi (2012) menyatakan bahwa kemiskinan berkorelasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mensejahterakan masyarakat, dimana masyarakat antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan

rendah sama-sama dapat menikmati hasil dari tingginya pertumbuhan ekonomi.

Studi Askenazy (2003) menunjukkan bahwa upah minimum memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui akumulasi modal manusia. Peningkatan upah minimum akan meningkatkan kehidupan yang layak sehingga standar hidup yang layak juga mengalami peningkatan yang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Jumlah upah minimum harus dapat memenuhi kebutuhan hidup secara minimal yaitu kebutuhan untuk sandang, pangan, untuk keperluan rumah tangga. Akibat peningkatan upah minimum yang diterima, daya beli masyarakat mengalami peningkatan sehingga berdampak pada *Human Development Indeks*. (Amirul Zamharir,2016)

Menurut Mirza (2012) pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan positif terhadap IPM, yang berarti pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, tetapi kesenjangan ekonomi antar daerah berpengaruh yang negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurut Cliff Laisina et al (2015) menyatakan bahwa pembangunan sosial adalah pendekatan secara eksplisit berusaha mengintegrasikan proses pembangunan ekonomi dan sosial. Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat bagi tercapainya pembangunan manusia karena dengan adanya pembangunan ekonomi terjamin peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan melalui kesempatan kerja, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan IPM memiliki keterkaitan satu sama lain karena apabila tingkat pertumbuhan ekonomi baik maka pembangunan manusia pun akan membaik.

Berdasarkan pendahuluan yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan dan upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan, upah minimum dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dan untuk mengetahui dan menganalisis bahwa pertumbuhan ekonomi memediasi pengaruh tingkat kemiskinan dan upah minimum terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dilakukan di kabupaten/kota di Provinsi Bali dengan menggunakan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistika. Alasan pengambilan lokasi penelitian Kabupaten/Kota di Provinsi Bali adalah karena masih ada ketimpangan di dalam indeks pembangunan manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati, mencatat, serta mempelajari dokumen yang terdapat dari instansi terkait seperti BPS Provinsi Bali. Data yang dikumpulkan tersebut adalah tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali, upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Bali, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali dan indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Teknik analisis data yang digunakan untuk pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif dengan bantuan program SPSS. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis deskriptif dan teknik analisis jalur (*Path Analysis*). Analisis jalur digunakan untuk mengetahui hubungan langsung variabel independen terhadap variabel dependen dan hubungan tidak langsung yang melalui variabel intervening. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_1 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e_1 \dots\dots\dots (1)$$

$$Y_2 = \beta_3 X_1 + \beta_4 X_2 + \beta_5 Y_1 + e_2 \dots\dots\dots (2)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif menyajikan informasi mengenai karakteristik variabel-variabel penelitian yaitu jumlah amatan, nilai minimum, nilai maksimum, nilai mean, dan standar deviasi. Untuk mengukur nilai sentral dari distribusi data dapat dilakukan dengan pengukuran rata-rata (*mean*) sedangkan standar deviasi merupakan perbedaan nilai data yang diteliti dengan nilai rata-ratanya. Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4.
Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviasi
Tingkat Kemiskinan	45	1,78	7,44	4,7160	1,57796
Upah Minimum	45	1622000	2700297	2068240,71	272138,622
Pertumbuhan Ekonomi	45	5,06	6,81	5,8656	0,41399
IPM	45	64,68	83,68	73,3989	5,45904

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa variabel tingkat kemiskinan (X_1) memiliki nilai minimum sebesar 1,78, nilai maksimum sebesar 7,44, mean sebesar

4,7160, dan standar deviasi sebesar 1,57796. Ini berarti bahwa terjadi perbedaan nilai tingkat kemiskinan yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya sebesar 1,57796.

Variabel upah minimum (X_2) memiliki nilai minimum sebesar 1622000, nilai maksimum sebesar 2700297, mean sebesar 2068240,71, dan standar deviasi sebesar 272138,622. Ini berarti bahwa terjadi perbedaan nilai upah minimum yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya sebesar 272138,622.

Variabel pertumbuhan ekonomi (Y_1) memiliki nilai minimum sebesar 5,06, nilai maksimum sebesar 6,81, mean sebesar 5,8656, dan standar deviasi sebesar 0,41399. Ini berarti bahwa terjadi perbedaan nilai pertumbuhan ekonomi yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya sebesar 0,41399.

Variabel indeks pembangunan manusia (Y_2) memiliki nilai minimum sebesar 64,68, nilai maksimum sebesar 83,68, mean sebesar 73,3989, dan standar deviasi sebesar 5,45904. Ini berarti bahwa terjadi perbedaan nilai indeks pembangunan manusia yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya sebesar 5,45904.

Perhitungan koefisien *path* dilakukan dengan menggunakan *software SPSS 18.0 for Windows*, Pengujian persamaan satu dilakukan untuk melihat tingkat kemiskinan dan upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. secara langsung, hasil uji regresi disajikan pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5.
Hasil Uji Path Analysis (Struktur 1)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-57,041	14,501		-3,934	,000
TingkatKemiskinan	-,097	,036	-,371	-2,725	,009
UpahMinimum	23,677	5,359	,601	4,418	,000

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 5 menunjukkan bahwa variabel tingkat kemiskinan (X_1) dengan nilai *standardized coefficients* sebesar -0,371 dan nilai sig. $0,009 < 0,05$, ini berarti bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1) di kabupaten/kota Provinsi Bali. Variabel upah minimum (X_2) dengan nilai *standardized coefficients* sebesar 0,601 dan nilai sig. $0,000 < 0,05$, ini berarti bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1) di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Perhitungan koefisien *path* dilakukan dengan menggunakan *software SPSS 18.0 for Windows*, Pengujian persamaan satu dilakukan untuk melihat tingkat kemiskinan, upah minimum dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali. secara langsung, hasil uji regresi disajikan pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6.
Hasil Uji Path Analysis (Struktur 2)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-344,745	93,781		-3,676	,001
TingkatKemiskinan	-,255	,113	-,074	-2,269	,029
UpahMinimum	27,154	7,379	,656	3,680	,001
PertumbuhanEkonomi	4,210	2,350	,319	1,792	,031

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 6 menunjukkan bahwa variabel tingkat kemiskinan (X_1) dengan nilai *standardized coefficients* sebesar -0,074 dan nilai sig. $0,029 < 0,05$, ini berarti bahwa tingkat kemiskinan(X_1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (Y_2) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Variabel upah minimum (X_2) dengan nilai *standardized coefficients* sebesar 0,656 dan nilai sig. $0,001 < 0,05$, ini berarti bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (Y_2) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Variabel pertumbuhan ekonomi (Y_1) dengan nilai *standardized coefficients* sebesar 0,319 dan nilai sig. $0,0031 < 0,05$, ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui hubungan-hubungan antar variabel penelitian yang merupakan koefisien jalur dalam penelitian ini. Koefisien jalur dapat dibuat dalam bentuk diagram jalur (Suyana, 2016: 159). Model tersebut juga dapat dinyatakan dalam persamaan struktural, yaitu:

Persamaan Struktural 1

$$Y_1 = -0,371 X_1 + 0,601 X_2 + e_1$$

Persamaan Struktural 2

$$Y_2 = -0,074 X_1 + 0,656 X_2 + 0,319 Y_1 + e_2$$

Nilai kekeliruan standar untuk variabel pertumbuhan ekonomi (Y_1) yang tidak dijelaskan oleh tingkat kemiskinan (X_1) dan upah minimum (X_2) yaitu:

$$e_1 = \sqrt{1 - R_1^2}$$

$$e_1 = \sqrt{1 - 0.921^2}$$

$$e_1 = 0.389$$

Nilai kekeliruan standar untuk indeks pembangunan manusia (Y_2) menunjukkan jumlah varian tingkat kemiskinan yang tidak dijelaskan oleh tingkat kemiskinan (X_1), upah minimum (X_2) dan pertumbuhan ekonomi (Y_1) yaitu:

$$e_2 = \sqrt{1 - R_2^2}$$

$$e_2 = \sqrt{1 - 0.957^2}$$

$$e_2 = 0.290$$

Untuk memeriksa validitas model, terdapat indikator untuk melakukan pemeriksaan, yaitu koefisien determinasi total hasilnya yaitu sebagai berikut.

$$\begin{aligned} R_m^2 &= 1 - e_1^2 \cdot e_2^2 \\ &= 1 - (0,389)^2 (0,290)^2 \\ &= 0.987 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka diperoleh bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model adalah sebesar 98,7 atau dengan kata lain informasi yang terkandung dalam data sebesar 99,9 persen yang dapat dijelaskan oleh model, dan sisanya sebesar 01,3 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model.

Perhitungan peran pertumbuhan ekonomi dalam memediasi pengaruh tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali sebagai berikut:

$$S_{\beta_1\beta_5} = \sqrt{\beta_5^2 s_{\beta_1}^2 + \beta_1^2 s_{\beta_5}^2}$$

$$S_{\beta_1\beta_5} = \sqrt{(4,210)^2 (0,036)^2 + (-0,097)^2 (2,350)^2}$$

$$S_{\beta_1\beta_5} = 0,115$$

Keterangan:

$S_{\beta_1\beta_5}$ = besarnya *standard error* tidak langsung

S_{β_1} = standar *error* koefisien β_1

S_{β_5} = standar *error* koefisien β_5

β_1 = jalur X_1 terhadap Y_1

β_5 = jalur Y_1 terhadap Y_2

$\beta_1\beta_5$ = jalur X_1 terhadap Y_1 (β_1) dengan jalur Y_1 terhadap Y_2 (β_5)

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung maka menghitung nilai z dari koefisien ab dengan rumus sebagai berikut:

$$Z = \frac{\beta_1\beta_5}{S_{\beta_1\beta_5}}$$

$$Z = \frac{(-0,097) (4,210)}{0,115}$$

$$Z = -3,551$$

Oleh karena Z hitung sebesar $-3,551 < -1,96$. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi (Y_1) sebagai variabel yang memediasi pengaruh tingkat kemiskinan (X_1) terhadap indeks pembangunan manusia (Y_2) kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Perhitungan peran pertumbuhan ekonomi dalam memediasi pengaruh upah minimum terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali sebagai berikut.

$$S_{\beta_1\beta_5} = \sqrt{\beta_5^2 s_{\beta_2}^2 + \beta_2^2 s_{\beta_5}^2}$$

$$S_{\beta_1\beta_5} = \sqrt{(4,210)^2 (5,359)^2 + (23,677)^2 (2,350)^2}$$

$$S_{\beta_1\beta_5} = 3216$$

Keterangan:

$S_{\beta_1\beta_5}$ = besarnya *standard error* tidak langsung

S_{β_1} = standar *error* koefisien β_1

S_{β_5} = standar *error* koefisien β_5

β_1 = jalur X_1 terhadap Y_1

β_5 = jalur Y_1 terhadap Y_2

$\beta_1\beta_5$ = jalur X_1 terhadap Y_1 (β_1) dengan jalur Y_1 terhadap Y_2 (β_5)

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung maka menghitung nilai z dari koefisien ab dengan rumus sebagai berikut :

$$Z = \frac{\beta_2\beta_5}{S_{\beta_2\beta_5}}$$

$$Z = \frac{(23,677) (4,210)}{3216}$$

$$Z = 0,030$$

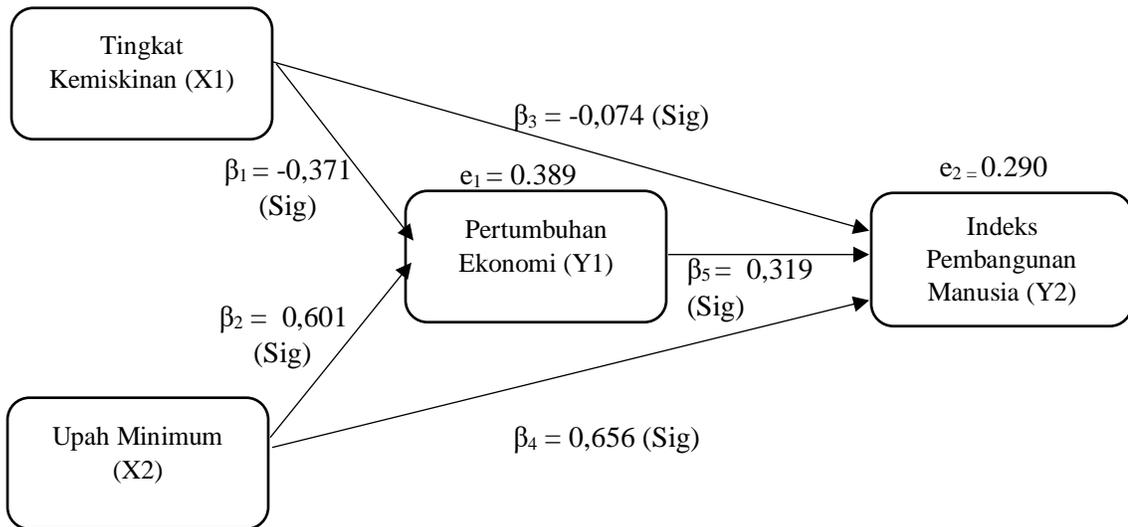
Oleh karena Z hitung sebesar $0,030 < 1,96$. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi (Y_1) bukan sebagai variabel yang memediasi pengaruh upah minimum (X_2) terhadap indeks pembangunan manusia (Y_2) kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Tabel 7.

Hubungan Variabel	Pengaruh		Total
	Langsung	Tidak Langsung Melalui Y1	
X1 - Y1	-0,371	-	-0,371
X1 - Y2	-0,074	-0.118	-0.192
X2 - Y1	0,601	-	0,601
X2 - Y2	0,656	0.191	0.847
Y1 - Y2	0,319	-	0,319

Sumber: Data diolah, 2020

Hasil uji analisis jalur dapat dilihat dengan jelas pada diagram hasil analisis jalur. Nilai *standardized coefisien* digunakan untuk mendapatkan koefisien yang memiliki basis unit yang sama, sehingga dapat dibandingkan secara langsung antar variabel bebas, dalam pengaruhnya terhadap variabel terikat.



Gambar 1.

Model Diagram Jalur Akhir Pengaruh Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Upah Minimum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Bali Tahun 2015-2019

Hasil pengujian hipotesis sebelumnya menunjukkan variabel tingkat kemiskinan (X_1) memiliki nilai *standardized coefficients* sebesar -0,371 terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya apabila kemiskinan naik sebesar satu persen maka pertumbuhan ekonomi akan turun sebesar -0,371 persen. Pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan

jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang (Tmabunan, 2011). Hasil ini sesuai dengan teori Yang mana menurut Kuznet dalam Tulus Tambunan (2001), pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur- angsur berkurang. Serta Hasan dan Quibria (2002) mengatakan bahwa tidak adalagi yang meragukan pentingnya pertumbuhan ekonomi bagi penurunan angka kemiskinan. Menurut Jonaidi (2012) menyatakan bahwa kemiskinan berkolerasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mensejahteraan masyarakat, dimana masyarakat antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah sama-sama dapat menikmati hasil dari tingginya pertumbuhan ekonomi.

Hasil pengujian hipotesis sebelumnya menunjukkan variabel upah minimum (X_2) memiliki nilai *standardized coefficients* sebesar 0,601 terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya apabila upah minimum naik sebesar satu rupiah maka pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 0,601 persen. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Julianto dan Suparno (2016) yang menyatakan dari perhitungan yang telah dilakukan maka terlihat juga bahwa salah satu faktor Pertumbuhan Ekonomi berdasar pada kenaikan Upah Minimum sehingga ditengah ketidakstabilan ekonomi pemerintah harus terus menyesuaikan Upah Minimum sehingga akan membawa dampak positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kota Surabaya.

Hasil pengujian hipotesis sebelumnya menunjukkan variabel tingkat kemiskinan (X_1) memiliki nilai *standardized coefficients* sebesar -0,074 terhadap indeks pembangunan manusia, artinya apabila tingkat kemiskinan naik sebesar satu persen maka indeks pembangunan manusia akan turun sebesar -0,074 persen. Dengan demikian hasil ini sejalan dengan penelitian Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf (2014) yang menyatakan bahwa tingkat kemiskinan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Riau. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori Neo-Liberal dan Demokrasi-sosial dimana konsep dan indikator kemiskinan yang mengacu pada kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Dalam argumennya bahwa kemiskinan merupakan persoalan individual yang disebabkan oleh kelemahan-kelemahan dan/atau pilihan-pilihan individu yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang dengan sendirinya jika kekuatan-kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya. Keunggulan mekanisme pasar dan pertumbuhan ekonomi yang secara alamiah dianggap akan mampu mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan sosial.

Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf (2014) yang menyatakan bahwa tingkat kemiskinan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Riau. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori Neo-Liberal dan Demokrasi-sosial dimana konsep dan indikator kemiskinan yang mengacu pada kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Dalam argumennya bahwa kemiskinan merupakan persoalan individual yang disebabkan oleh kelemahan-kelemahan dan/atau pilihan-pilihan individu yang bersangkutan. Kemiskinan akan

hilang dengan sendirinya jika kekuatan-kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya. Keunggulan mekanisme pasar dan pertumbuhan ekonomi yang secara alamiah dianggap akan mampu mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan social.

Hasil pengujian hipotesis sebelumnya menunjukkan variabel upah minimum (X_2) memiliki nilai *standardized coefficients* sebesar 0,656 terhadap indeks pembangunan manusia, artinya apabila upah minimum naik sebesar satu rupiah maka indeks pembangunan manusia akan naik sebesar 0,656 persen. IPM merupakan ukuran keberhasilan pembangunan manusia secara rata-rata. Komponen dari perhitungan IPM meliputi angka harapan hidup saat kelahiran, angka melek huruf, rata-rata ama sekolah serta kemampuan daya beli. Angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan tingkat kesehatan yang tinggi pada masyarakat. Hal ini akan berdampak pada rendahnya angka kematian sehingga terdapat banyak penduduk usia non-produktif. Akan tetapi usia senja biasanya tidak berpenghasilan atau berpenghasilan tetapi tidak banyak. Hal ini berpotensi besar dalam meningkatnya ketimpangan UMK di setiap Kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Chalid dan Yusuf (2014) yang menyatakan koefisien regresi variabel upah minimum kabupaten/kota sebesar 0,005 menunjukkan pengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Hal ini berarti setiap kenaikan upah minimum kabupaten/kota Rp1000, maka akan meningkatkan sebesar 0,005 poin dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Hasil pengujian hipotesis sebelumnya menunjukkan variabel pertumbuhan ekonomi (Y_1) memiliki nilai *standardized coefficients* sebesar 0,319 terhadap indeks pembangunan manusia, artinya apabila pertumbuhan ekonomi naik sebesar satu rupiah maka indeks pembangunan manusia akan naik sebesar 0,319 persen. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat sehingga IPM disuatu daerah justru juga mengalami peningkatan. Dimana semakin tinggi pendapatan nasional atau daerah maka semakin besarlah harapan untuk pembukaan kapasitas produksi baru yang tentu saja akan menyerap tenaga kerja baru. Pendapatan yang tinggi tercermin dari tingginya pendapatan perkapita dan tumbuh secara positif dan berarti. Maka secara relatif semakin baik pertumbuhan ekonomi, maka semakin besarlah harapan untuk tidak menganggur sehingga akan mendorong pemerataan pendapatan perkapita sehingga mendorong meningkatnya indeks pembangunan manusia (Putong, 2009)

Dengan berfluktuasinya pertumbuhan ekonomi maka akan menurunkan pendapatan perkapita masyarakat sehingga IPM disuatu daerah justru juga mengalami penurunan. Dimana semakin rendah pendapatan nasional atau daerah maka semakin rendah harapan untuk pembukaan kapasitas produksi baru yang tentu saja akan menyerap tenaga kerja baru. Pendapatan yang tinggi tercermin dari tingginya pendapatan perkapita dan tumbuh secara positif dan berarti. Namun apabila pendapatan rendah maka akan lebih sulit dalam penyerapan tenaga kerja baru. Dalam hal ini Indeks Pembangunan Manusia tetap mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hasil Penelitian ini didukung oleh penelitian (Mirza, 2012) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa

variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan dengan elastisitas positif sebesar 0,153434 terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009. Sedangkan dalam penelitian ini tidak ditemukan pengaruh positif antara pertumbuhan ekonomi terhadap IPM.

Hasil pengujian menunjukkan pertumbuhan ekonomi memediasi tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Ini berarti meningkatnya kemiskinan mempengaruhi secara langsung terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam kemiskinan. Perbaikan di bidang kesehatan yang dilakukan pemerintah dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, dan anak-anak usia sekolah dapat bersekolah dan menerima pelajaran dengan baik. Tingkat pendidikan membuat pekerja mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang selanjutnya menyebabkan produktivitas meningkat dan pendapatannya juga meningkat. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan meningkat yang kemudian akan menyebabkan tingkat kemiskinannya berkurang. Terdapat hubungan penting antara IPM dan kapasitas pendapatan produktif. Pendapatan merupakan penentu utama dan hasil dari pembangunan manusia. Orang miskin menggunakan tenaga mereka untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi kemiskinan akibat kurangnya pendidikan, serta gizi dan kesehatan yang buruk mengurangi kapasitas mereka untuk bekerja. Dengan demikian, akibat rendahnya IPM adalah orang miskin tidak dapat mengambil keuntungan oportunitas pendapatan produktif karena terjadinya pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu,

penyediaan pelayanan sosial dasar merupakan unsur penting dalam penanganan kemiskinan (Kanbur dan Squire,1999) Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Chalid dan Yusuf, 2014) dimana diperoleh hasil penelitian tingkat kemiskinan berpengaruh negatif terhadap IPM.

Hasil pengujian menunjukkan pertumbuhan ekonomi tidak memediasi upah minimum terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Ini berarti meningkatnya upah minimum tidak mempengaruhi secara langsung terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Perlu diperhatikan bahwa Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan bila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari tahun sebelumnya. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan (Chalid dan Yusuf, 2014). Menurut Sulistiawati, (2012). Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tidak berkualitas sehingga tidak membawa dampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja dan menjadikan kesejahteraan masyarakat menurun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi dianggap tidak berkualitas sehingga tidak membawa dampak pada penyerapan tenaga kerja, rendahnya kualitas

pertumbuhan ekonomi diindikasikan oleh tingkat penyerapan tenaga kerja yang relatif rendah dan lambat kenaikannya.

SIMPULAN

Pemerintah Provinsi Bali dan pihak – pihak yang terkait perlu membentuk kebijakan yang dapat bermanfaat bagi pemerataan infrastruktur serta pendidikan. Sebab tidak seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali dapat merasakan manfaat dari dan fasilitas yang ada, terlebih lagi standar pendidikan yang sama. Pembangunan yang diperlukan tentu tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan – pertimbangan yang menguntungkan dan berguna bagi masyarakat umum.

Setiap kabupaten/kota dengan potensi masing – masing tentu memiliki kelebihan yang dapat menjadi acuan untuk peningkatan upah minimum. Melalui potensi dan daya saing yang ada diharapkan tiap kabupaten/kota di Provinsi Bali berupaya maksimal untuk menciptakan program, lapangan pekerjaan, pelatihan, dan berbagai bentuk kegiatan lain yang dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan diri, yang secara otomatis berpotensi untuk meningkatkan perekonomian, khususnya upah minimum.

Referensi

- Aloysius Gunadi Brata. (2002). Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Regional Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 7(2), H:3
- Ardiansyah dan Vitalis Ari Widiyaningsih. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. Lombok: SNA 17 Mataram, Lombok. Universitas Mataram.
- Artana Yasa, I Komang Oka; Arka, Sudarsana. (2015). Pengaruh Pertumbuhan

- Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 8(1). pp: 1-11.
- Anonymous. (2019). *Bali Dalam Angka*. BPS Bali: Denpasar.
- Anonymous. (2020). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponennya di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali 2015-2019. *Bali Dalam Angka*. BPS: Denpasar.
- Anonymous. (2020). Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali 2015-2019. *Bali Dalam Angka*. BPS: Denpasar.
- Anonymous. (2020). Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Bali 2015-2019. *Bali Dalam Angka*. BPS: Denpasar.
- Anonymous. (2020). Tingkat Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Bali 2015-2019. *Bali Dalam Angka*. BPS: Denpasar.
- Askenazy, Philippe. (2003). *Minimum Wage, Export, and Growth*. *European Economic Review* 47. pp 114 – 167.
- Astrini Myanti, I Made. (2013). Pengaruh Pdrb, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. 2(8), H:2102-2132.
- Ayu Purnama Margareni Ni Putu, Djayastra I Ketut, Murjana Yasa I.G.W. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Provinsi Bali. *Jurnal Piramida*. 7(1). H:101-110.
- Ayu Putri Wahyuni, I Gusti; Made Sukarsa dan Nyoman Yuliarmi. (2014). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. 3(8), H: 458-477.
- Bela, Gede Bayu Khrisna dan Djinar Setiawina. (2019). Pengaruh PAD, PMDN, Tenaga Kerja dan IPM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. 8(7), H:1666-1696.
- Chalid, Nursiah. Yusuf, Yusbar. (2014). Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi*. 22(2). H:1-12.
- Darmawan, Agus Pande. Wenagama, I Wayan. (2017) Pengaruh Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. 6(10). pp. 1868-2101.

- Gianie. (2009). Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga kerja Berpendidikan Rendah Di Sektor Industri dan Perdagangan. Tesis. Universitas Indonesia: Jakarta.
- Hariawan dan Swaningrum. (2015). Analisis Indeks Pembangunan Manusia Pada 5 Wilayah Hasil Pemekaran di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*.8(1). H:72-78.
- Ishartono, & Raharjo S.T. (2016). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan. *Social Work Journal*, 6(6). pp: 159-167.
- Jayanthi, Ni Kadek Eka dan Sudarsana, Arka. (2015). Analisis Pengaruh Ekspor, Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. 8(9), H:2102-2132
- Juliant, Foengsitanojo Trisantoso dan Suparno. (2016). Analisis Pengaruh Jumlah Industri Besar Dan Upah Minimum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*. 1(2).H:229 – 256.
- Jonaidi, A. (2012). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1 (1): 140-164
- Kanbur, Ravi dan Lyn Squire. 1999. The Evolution of Thinking about Poverty: Exploring The Interactions. <http://kanbur.dyson.cornell.edu/papers.htm>. Diakses tanggal 08 Oktober 2020
- Kemenuh, Ida Bagus Adi Mahaputra dan Wenagama, I Wayan. (2017). Efektivitas dan Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) Terhadap Pendapatan Keluarga KK Miskin. 6(9). Pp: 1658-1686).
- Khusaini Jember dan Swara. (2010). Kemiskinan di Bali. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana: *Jurnal Piramida*. 7(2). H:1-22.
- Kusuma, Hendra. (2016). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 9(1). pp: 1-92.
- Kusumah, Rachmah Dewi., Budi Warsito., Moch. Abdul Mukid. (2017). Perbandingan Metode K Means Dan Self Organizing Map (Studi Kasus: Pengelompokan Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Berdasarkan Indikator Indeks Pembangunan Manusia 2015). *Jurnal Gaussian*, 6(3), H: 429-437.
- Laisina, Cliff, Vecky Masinambow, Wensy Rompas. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap Pdrb Melalui Indeks Pembangunan Manusia Di Sulawesi Utara Tahun 2002-2013. 15(4). H:5.
- Maipita, Indra. (2014). *Memahami dan Mengukur Kemiskinan, Cetakan I*. Absolute Media: Yogyakarta.

- Kembar, Made. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Bali: Analisis FEM Data Panel. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 6(1). H:1-6.
- Mirza, Denni Sulistio. (2012). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah 2006-2009. *Economic Development Analysis Journal*. 1(2). H:102-113.
- Khusaini, Muhammad Dr. (2006). Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah, BPFE Unibraw.
- Nila Mustika, Fiky. Setyowati, Eni. Alam, Azhar. (2019). Analysis of Effect of ZIS (Zakat, Infaq, And Shadaqah), Regional Domestic Products of Bruto, Regional Minimum Wage and Inflation on Levels Poverty in Indonesia 2012 – 2016. *Journal of Islamic Economic Laws*. 2(2). pp:193-211.
- Nur Isa Pratowo. "Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia". *Jurnal Studi Ekonomi Indonesia Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret (Surakarta, t.th)*,16.
- Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tentang Ketenagakerjaan
- Patta, Devyanti. (2012). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan Periode 2001-2010. Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Hassanudin, Makasar.
- Pisano, U.,L.K. Lange, M. Hametner dan G. Berger. (2015). The Sustainable Development Goals (SDGs) and Their Impact on the European SD Governance Framework. *ESDN Quarterly Report*. 35. H:1-55.
- Putong, Iskandar. (2009). Pengantar Mikro dan Makro Edisi 4. Mitra Wacana: Jakarta
- Rustariyuni, Surya Dewi. (2014). Pengaruh Gini Ratio, Pengeluaran Makanan Non-Perkapita, Belanja Daerah dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2004-2012. *Jurnal Piramida*. 10(1). H:45-55.
- Seran, Sirilius. (2017). Hubungan Antara Pendidikan, Pengangguran, Dan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 10(2). H:59-71.
- Sianturi, (2007). Analisis Pengaruh Tingkat Investasi Pendapatan Asli Daerah dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB di Jawa tengah (tesis). Megister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sulistiawati, Rini. (2012). Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak. 8(3). 195-211

- Suryadarma dan Sumarto. (2011). Survey of recent developments. *Bulletin of Indonesia Economic Studies*. 47(2). H:155-181.
- Tambunan, Tulus T.H, (2001), *Perekonomian Indonesia*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Todaro, Michael P. and Stephen C. Smith. (2006). *Pembangunan Ekonomi (edisi kesembilan, jilid I)*. Erlangga: Jakarta.
- Undang-Undang 13 Tahun 2000. Tentang Tenaga Kerja
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah.
- Von Luebke, Christian. 2009. The Political Economy of Local Governance: Findings From an Indonesian Field Study. *Bulletin of Indonesian Economics Studies*. 45(2): pp.201-230.
- World Bank. (1997). On line source book on decentralization and rural development. Decentralization Thematic Team.
- Yusuf dan Sumner. 2015. Growth, Poverty, and Inequality Under Jokowi. *Bulletin Of Indonesian Economic Studies*, Vol.51, No.3, ISSN:0007-4918
- Zamharir, Amirul. (2016) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Pdrb Perkapita, Dan Upah Minimum Terhadap Human Development Index: Studi Kasus 12 Provinsi Dengan Kategori Lower Medium Di Indonesia. Skripsi Thesis, Universitas Airlangga.